

Peran Aktor dalam Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rembang

Faradilla Nisrina Affandi, Hardi Warsono

Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id



ABSTRACT

Stunting is a linear growth disorder that occurs during pregnancy up to 24 months of age indicating a long-term event and cumulative impact of inadequate nutrition, health, and parenting. The factors that cause stunting come from internal factors and external factors. Stunting has an impact on the quality of human resources in the future. The purpose of this study is to analyze the role of actors involved in accelerating stunting reduction. The method used is qualitative descriptive, using data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study show that the primary actors consist of the Health Office and the Social Service for Women's Empowerment and Family Planning. Secondary actors consist of the Agriculture and Food Security Office, the National Amil Zakat Agency, the Village Assistance Team, Posyandu Cadres, the Community, and PT Sumber Alfaria Trijaya. At the implementation stage, several problems were still found related to human resources, egosectoral, communication constraints, and the existence of public trust that caused stunting handling to not run optimally.

Keywords: Stunting, Role of actors

ABSTRAK

Stunting adalah gangguan pertumbuhan linier yang terjadi pada saat kehamilan hingga berumur 24 bulan yang mengindikasikan kejadian jangka panjang dan dampak kumulatif dari kurangnya zat gizi, kesehatan, dan pola asuh yang kurang memadai. Faktor penyebab stunting berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Stunting berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran aktor yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor primer terdiri dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Aktor sekunder terdiri dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Badan Amil Zakat Nasional, Tim Pendamping Desa, Kader Posyandu, Masyarakat, dan PT Sumber Alfaria Trijaya. Pada tahapan pelaksanaan masih ditemukan beberapa permasalahan berkaitan dengan SDM, egosektoral, kendala komunikasi, dan adanya kepercayaan masyarakat yang menjadi penyebab penanganan stunting belum berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci: Stunting, Peran Aktor

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan lahirnya bangsa Indonesia adalah memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kesehatan merupakan kunci kesejahteraan masyarakat. Kesehatan diukur dari pola pikir, lingkungan, gaya hidup, pola makan, sanitasi, pemenuhan gizi, dan lain sebagainya. Kesehatan menjadi investasi sumber daya manusia bagi sebuah negara di masa yang akan datang. Kesehatan menjadi salah satu pilar dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Sustainable Development Goals* merupakan komitmen bersama negara maju maupun negara berkembang yang digunakan sebagai indikator untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar. SDGs menyoal berbagai aspek dalam kehidupan yang menjadi sebuah solusi atas keterbelakangan pembangunan di berbagai negara di dunia. Kesehatan yang menjadi pilar keempat SDGs mendeskripsikan mengenai pemberantasan kelaparan, ketahanan pangan, meningkatkan nutrisi, dan mendorong pertanian penghasil bahan pangan potensi daerah yang berkelanjutan guna pemenuhan gizi nasional. Selain itu, jaminan kehidupan yang sehat serta

mendukung kesejahteraan semua masyarakat, menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan (akses kespro, Keluarga Berencana/ KB), menyediakan ketersediaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk masyarakat (sanitasi dan air bersih).

Isu di Indonesia antara lain ketidakmerataan akses kesehatan, kematian ibu, kematian bayi, ketidakmerataan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, gizi buruk dan malnutrisi, dan stunting. *Stunting* atau yang biasa dikenal dengan kerdil merupakan permasalahan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut WHO pada tahun 2015 stunting diartikan sebagai gangguan atau permasalahan tumbuh kembang akibat dari kurang gizi dan infeksi, dicirikan dengan ukuran atau tinggi badannya berada di bawah standar yang telah ditetapkan dan akan mengganggu tumbuh kembang anak dan berdampak pada sumber daya manusia. Faktor penyebab stunting antara lain faktor yang berasal dari ibu seperti status gizi ibu yang buruk, kurangnya nutrisi pada saat remaja, infeksi ibu, kehamilan remaja atau menikah muda, jarak kelahiran pendek. Faktor lainnya adalah infeksi pada balita

seperti diare, kondisi ekonomi, pekerjaan dan mata pencaharian keluarga, dan rendahnya akses terhadap layanan kesehatan termasuk sanitasi dan air bersih Kemenkes dalam (Komalasari et al., 2020).

Prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 21,6%. Tingginya angka stunting yang ada di Indonesia, mendorong pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanganan angka stunting. Langkah yang digunakan untuk menekan kasus stunting terwujud dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan penurunan Stunting yang bekerjasama dengan tiap-tiap daerah dan *stakeholder* terkait yang ada di Indonesia dengan berpedoman pada kondisi sebuah wilayah dan RPJMD masing-masing daerah. Pemerintah juga menetapkan target prevalensi stunting sebesar 14%. Permasalahan penanganan stunting di Indonesia antara lain adalah ketidaksikronan data, adanya egosektoral antar aktor, dan pengetahuan masyarakat terkait dengan stunting masih kurang.

Peran aktor sangat penting untuk terlibat dalam sebuah program percepatan penurunan stunting. Peran aktor sangat diperlukan untuk memberikan edukasi dan pendampingan mengenai keseimbangan pola makanan yang bergizi di masyarakat (Purnomo et al., 2022). Stunting

merupakan isu kesehatan yang serius dan jika tidak diselesaikan akan berdampak pada masa depan sebuah bangsa. Penelitian oleh (Permanasari et al., 2020) menyebutkan bahwa dalam penanganan stunting di beberapa daerah prioritas penanganan ditemukan bahwa hubungan koordinasi lintas sektor belum optimal baik ditingkat provinsi maupun kabupaten

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah kasus stunting tinggi dan menjadi daerah prioritas penurunan stunting. Pada tahun 2022 kasus stunting Provinsi Jawa Tengah sebesar 21,7%. Kabupaten Rembang berada di urutan keenam dengan kasus stunting tinggi di Provinsi Jawa Tengah dengan kasus prevalensi stunting yang masih cukup tinggi. Kasus stunting di Kabupaten Rembang pada tahun 2018-2023 bersifat fluktuatif dan cenderung untuk sulit di kendalikan.



Sumber : RPJMD dan Website Pemkab Rembang

Prevalensi stunting Kabupaten Rembang pada tahun 2023 sebesar 19,5% masih tergolong tinggi karena berada di atas rata-rata yang telah ditetapkan oleh nasional sebesar 14%. Masih tingginya

angka stunting di Kabupaten Rembang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rosanti,2023) disebabkan karena masih kurangnya komunikasi berbagai sektor, sumber daya terkait fasilitas dan layanan terkait dengan stunting masih kurang memadai, kurangnya kerjasama antar perangkat daerah dan masih adanya egosektoral, kurangnya penerapan pola hidup sehat dan belum adanya peningkatan perbaikan akses sanitasi. Struktur birokrasi yang berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masih dalam tahap penyusunan dan ketidakjelasan SE terkait strategi perubahan perilaku tentang stunting (Pratama, & Nurcahyanto, 2024).

Faktor lainnya adalah kebudayaan, kebudayaan merupakan cara hidup atau nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat dan menjadi ciri khas dalam suatu daerah. Salah satu penyebab stunting terkait dari faktor kebudayaan. Penelitian melalui literatur *review* yang dilakukan oleh (Latifah, 2024) menunjukkan bahwa faktor kebudayaan menjadi penghambat dalam penanganan stunting. Dalam beberapa kasus di Kabupaten Rembang masih ada kebudayaan mengenai pernikahan usia muda yang menjadi penyebab stunting. Sisi religious atau berkaitan dengan kepercayaan juga menjadi faktor penyebab stunting. Adanya asumsi bahwa pemberian imunisasi

dianggap haram oleh sebagian masyarakat akan mengakibatkan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Sisi religious.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rembang Bersama dengan subjek penelitian Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Puskesmas, BAZNAS, Tim Pendamping Keluarga, Kader Posyandu, Masyarakat, dan PT Alfaria Trijaya.

Data primer didapatkan dari wawancara dengan subjek penelitian. Adapun data sekunder diperoleh melalui website, dokumen pemerintah, dan laporan kinerja instansi pemerintah daerah terkait dengan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rembang.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk kemudian di analisis yang dilakukan melalui tahap, yaitu : 1) Kondensasi data, 2) Penyajian data, 3) Penarikan Kesimpulan. Mengukur kualitas data menggunakan triangulasi sumber dan Teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Aktor dalam Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rembang

Identifikasi aktor dalam Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rembang menggunakan teori Townsley dalam Hidayah (2019) yang mengklasifikasikan aktor menjadi dua yaitu aktor primer dan aktor sekunder.

Aktor primer yaitu aktor yang memiliki kepentingan langsung terhadap sumber daya terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan Puskesmas. Aktor sekunder yaitu aktor yang membantu aktor primer yang bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh aktor primer yang terdiri dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, BAZNAS, Tim Pendamping Keluarga, Kader Posyandu, Masyarakat, dan PT Alfaria Trijaya.

Peran Aktor dalam kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rembang

1. Pembuat kebijakan

Pembuat kebijakan adalah pihak yang mengambil keputusan atau membuat program dan menentukan keberjalanan sebuah program.

Peran Dinas Kesehatan sebagai pembuat kebijakan yaitu

membuat kebijakan terkait dengan percepatan penurunan stunting yang dilakukan dengan membuat program TELPONI (*Temokno, Laporno, Openi*).

Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana juga memiliki peran sebagai pembuat kebijakan dengan menciptakan program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang membantu calon pengantin untuk memberikan edukasi terkait dengan kesehatan dan menekan angka KDRT dalam rumah tangga.

2. Koordinator

Koordinator yaitu pihak yang mengkoordinasikan aktor lain dalam menjalankan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rembang.

Dinas Kesehatan merupakan salah satu aktor yang juga berperan sebagai koordinator. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang mengkoordinasikan aktor dalam bidang pelayanan intervensi sensitif dan spesifik. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang mengkoordinasikan anggota dalam bidang tersebut untuk turut berperan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rembang.

Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana juga memiliki peran sebagai koordinator dalam bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga. Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana mengkoordinasikan aktor lain untuk turut berperan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rembang.

3. Fasilitator

Fasilitator adalah pihak yang memenuhi dan mewadahi kebutuhan kelompok sasaran yang ditentukan dalam sebuah kebijakan Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merupakan salah satu aktor yang berperan sebagai fasilitator dengan memberikan edukasi kepada para kader. Puskesmas juga menjadi wadah masyarakat untuk mendapatkan layanan pencegahan stunting mulai dari ibu hamil hingga menyusui.

Tim Pendamping Keluarga termasuk dalam fasilitator. Peran dari Tim Pendamping Keluarga adalah mendata masyarakat yang memiliki anak berkategori stunting, untuk kemudian data tersebut diserahkan ke puskesmas. Tim

Pendamping Keluarga juga memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan stunting dan bagaimana mencegah dan merawat anak yang stunting.

Kader Posyandu berperan sebagai pemberi layanan dan informasi terkait stunting. Kader Posyandu juga sebagai wadah masyarakat untuk melaporkan kesehatan rutin dalam kurun waktu tertentu. Kader posyandu juga mewadahi kelompok sasaran seperti remaja hingga lansia dengan membrikan fasilitas layanan kesehatan seperti posyandu anak, remaja, dan ibu hamil.

4. Implementor

Implementor adalah pihak yang melaksanakan kebijakan yang telah disepakati. Implementor juga menjalankan program-program terkait dengan penurunan stunting di Kabupaten Rembang

Dinas Kesehatan merupakan pelaksana program TELPONI (*Temokno, Laporno, Openi*) yang diimplementasikan di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang.

Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai salah satu pelaksana program PUSPAGA

yang memberikan edukasi kepada calon pengantin. Peran lain sebagai implementor adalah dengan menjalankan program ASN Sedekah Telur Peduli Stunting dengan bekerja sama dengan para ASN di Kabupaten Rembang untuk menyumbang telur untuk kemudian dibagikan kepada kelompok sasaran yang membutuhkan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berperan sebagai pelaksana program P2L (Pekarangan Pangan Lestari) dan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman). Dintanpan belum memiliki program terkait penurunan stunting, tetapi mengimplementasikan program P2L dan B2SA dengan sasaran kepada kelompok tani.

Masyarakat merupakan penerima kebijakan percepatan penurunan stunting. Masyarakat melaksanakan program posyandu anak, posyandu remaja, dan kelas ibu hamil. Masyarakat juga mendapatkan sosialisasi dari aktor terkait program percepatan penurunan stunting.

5. Akselerator

Akselerator adalah pihak yang turut berkontribusi dan

mendorong sebuah kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

BAZNAS adalah aktor yang berperan mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rembang. Peran BAZNAS adalah memberikan bantuan pengobatan kepada masyarakat kurang mampu dan memberikan bantuan PMT (Pemberian Makanan Tambahan).

PT Alfaria Trijaya sebagai pihak swasta yang juga memberikan bantuan terhadap program percepatan penurunan stunting. Peran dari PT Alfaria Trijaya adalah memberikan PMT kepada masyarakat yang memiliki anak dengan kategori stunting.

Faktor Pendorong Peran Aktor dalam Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rembang

Nilai merupakan keyakinan dan sebagai patokan yang mengarahkan perbedaan serta cara pengambilan Keputusan dalam menghadapi sesuatu yang sifatnya spesifik Rokeach dalam (Adisubroto & Dalil, 1993).

Nilai yang dianut peran aktor dalam percepatan penurunan stunting adalah nilai BERAKHLAK (Berorientasi pada Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Kebijakan merupakan tindakan yang diambil oleh individu, kelompok, organisasi, maupun pemerintah dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kebijakan yang dianut oleh para aktor dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rembang adalah Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Rembang.

Faktor Penghambat dalam kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rembang

Komunikasi merupakan sebuah kegiatan mengirim atau menerima pesan antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Komunikasi dalam suatu organisasi selalu merupakan komunikasi timbal balik, demi kepentingan semua.

Komunikasi menjadi faktor penghambat karena sering terjadi miskomunikasi antar aktor karena kesibukan dari masing-masing aktor sehingga menghambat peran aktor untuk melaksanakan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rembang.

Kepercayaan atau *trust* merupakan sesuatu yang diyakini oleh individu ataupun kelompok terhadap sebuah hal, seseorang, ataupun keadaan. Sebagian masyarakat Kabupaten Rembang masih terpengaruh

pada stigma dan mitos-mitos yang menghambat peran aktor dalam mengimplementasikan program.

Beberapa stigma yang masih ada di masyarakat terkait dengan anggapan imunisasi haram, kepercayaan banyak anak banyak rezeki, stigma tentang usia menikah di usia muda, dan menganggap stunting sebagai aib.

KESIMPULAN

Terdapat sembilan aktor yang terlibat dalam program penurunan stunting di Kabupaten Rembang, diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (DinsosPPKB) Kabupaten Rembang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Puskesmas, Kader Posyandu, Masyarakat, dan PT Alfaria Trijaya.

Aktor primer dalam kebijakan Percepatan penurunan stunting terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan puskesmas. Aktor sekunder dalam kebijakan Percepatan penurunan stunting terdiri dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Kader Posyandu, Masyarakat, dan PT Alfaria Trijaya.

Peran aktor dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rembang terdiri dari lima bagian yaitu pembuat kebijakan, coordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator. Pembuat Kebijakan) terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.

Koordinator terdiri dari Dinas kesehatan Kabupaten Rembang dan Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang. Fasilitator terdiri dari Puskesmas, posyandu, Tim Pendamping Desa (TPK)

Implementor terdiri dari Dinas kesehatan, Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang, dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang, serta masyarakat, serta akselerator : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), PT Alfaria Trijaya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti membuat saran terkait dengan program penurunan stunting di Kabupaten Rembang, diantaranya adalah :

1. Membuat prioritas program percepatan penurunan stunting di setiap OPD.

2. Menciptakan kesepemahaman antar aktor terkait pelaksanaan program percepatan penurunan stunting,
3. Memberikan kejelasan informasi secara rinci terkait tugas dan tanggung jawab aktor serta batasan-batasan dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.
4. Mengembangkan kapasitas kader melalui sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kader.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisubroto, & Dalil. (1993). Nilai: Sifat dan Fungsinya. *Buletin Psikologi*, 1(2), 28–33.
<https://journal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/13163/9427>
- Agustin, L., & Rahmawati, D. (2021). Hubungan Pendapatan Keluarga dengan Kejadian Stunting. *Indonesian Journal of Midwifery (IJM)*, 4(1), 30.
<https://doi.org/10.35473/ijm.v4i1.715>
- Arafat, S. Y., Priyadi, B. P., & Rahman, .Amni Zakarsyi. (2022). Analisis Peran Aktor Dalam Pengembangan Obyek Wisata Umbul Susuhan di Desa Manjungan Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. *Journal of Public Policy*.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/34696%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/34696/27295>
- Destiana, R., Yuningsih, T., Imam, J., Sh, B., Semarang, N., Aksi, R., &

- Penyengat, P. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau Indonesia berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 menjadi Pengembangan Destinasi Pariwisata mengenai sarana dan parasarana pe. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 08(02), 132–153.
- Dewi, E. R., Mubaroq, M. H., & Febriani, D. (2022). Penerapan Metode Door to Door Dalam Pendampingan Gizi Balita Stunting di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 5(2), 111–120.
- Elista, A., & Rahman, A. Z. (2020). Peran Stakeholder dalam Program Pencegahan Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 363–377. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/31422%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/31422/25610>
- Gayatri, N. A. P. (2023). Analisis peran. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(1). [file:///C:/Users/lenovo/Downloads/te sisjamalkarokaro.pdf](file:///C:/Users/lenovo/Downloads/te%20sisjamalkarokaro.pdf)
- Hidayah, N. A., Hutagalung, S. S., Hermawan, D., Ilmu, F., Lampung, U., & Pringsewu, K. (2019). *Jurnal Administrasi Publik Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu Peran stakeholder dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan termasuk pembangun.* 7, 55–71.
- Ikeanyibe, O. M., Eze Ori, O., & Okoye, A. E. (2017). Governance paradigm in public administration and the dilemma of national question in Nigeria. *Cogent Social Sciences*, 3(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1316916>
- Iswara, N. F., & Ahmad Syafiq. (2024). Pentingnya Protein Hewani dalam Mencegah Balita Stunting: Systematic Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 7(1), 110–117. <https://doi.org/10.56338/mppki.v7i1.4631>
- J, R. F., Huljannah, N., & Rochmah, T. N. (2022). Stunting Prevention Program in Indonesia: A SYSTEMATIC REVIEW. *Media Gizi Indonesia*, 17(3), 281–292. <https://doi.org/10.20473/mgi.v17i3.281-292>
- Komalasari, Supriati, E., Sanjaya, R., & Ifayanti, H. (2020). faktor penyebab stunting pada balita. *Jurnal Majalah Kesehatan*, 1(2), 51–56.
- Latifah, L. (2024). *Mengurai Simpul Masalah Stunting Di Jawa Tengah.* 1(1), 1–11.
- Miles, Huberman, & Saldana. (2014). *Metode Penelitian Miles, Huberman dan Saldana.* 48.
- Muhammad Rizal Wahyu Pratama, Herbasuki Nurcahyanto, K. (2024). Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13. <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>
- Mustajab, A. azam, & Indriani, F. (2023). Hubungan Menikah Usia Anak Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Wonosobo. *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia*, 7(1), 2–7.

<https://doi.org/10.52020/jkwgi.v7i1.5494>

- Nawawi, J. (2012). Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance. *Scientific Work*, 1(03), 19–28.
- Oktavia, R. (2021). Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Keluarga Dengan Kejadian Stunting. *Jurnal Medika Hutama*, 03(01), 1616–1620. <http://jurnalmedikahutama.com>
- Pamungkas, C. E., WD, S. M., & Nurbaety, B. (2021). Hamil usia muda dan stunting pada balita usia 12-59 bulan di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Kebidanan*, 10(2), 141. <https://doi.org/10.26714/jk.10.2.2021.141-148>
- Permanasari, Y., Permana, M., Pambudi, J., Rosha, B. C., Susilawati, M. D., Rahajeng, E., Triwinarto, A., & Prasodjo, R. S. (2020). Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 30(4), 315–328. <https://doi.org/10.22435/mpk.v30i4.3586>
- Purnomo, D., Kurniawati, E., Padjalo, Y., Imelarosana, N., Nona, & Pratiwi, W. (2022). Strategi Percepatan Penurunan Stunting melalui Pendampingan Kader Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) dan Forum Suara Keluarga Berisiko Stunting Kelurahan Kauman Kidul Salatiga Tahun 2022. *JMS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Magistrorum Et Sclarium*, 03(01), 141–156. <https://ejournal.uksw.edu/jms/article/view/7985%0Ahttps://ejournal.uksw.edu/jms/article/download/7985/2344>
- Putri, A. R. (2020). ASPEK POLA ASUH, POLA MAKAN, DAN PENDAPATAN KELUARGA PADA KEJADIAN STUNTING. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 12(2), 6. <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>
- Putri, C. S., & Jatiningih, O. (2020). Pelaksanaan Peran Pkk Dalam Menggerakkan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo. *Ejournal.Unesa*, 08(03), 887–901. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/36233>
- Rahmanto, A. F. (2004). Peranan Komunikasi dalam Suatu Organisasi. *Jurnal Komunikologi*, 1(2), 60–61. http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4603-Aris_F.pdf
- Rosanti, L. D. A. (2023). implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah (Studi di Kecamatan Sulang). *Journal of Civic ...* <http://eprints.ipdn.ac.id/12674/>
- Saputra Napitupulu, F., Subowo, A., Afrizal, T., Profesor, J., & Soedarto, H. (2020). *Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang*.
- Sari, R. maiseptya, Oklaini, S. T., Ningsi I, D. A., & Lozalia, L. (2022). Hubungan Kehamilan Ibu Usia Muda Dengan Kejadian Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Bumi Agung Kota Pagar Alam. *Indonesian Health Science Journal*, 2(1), 10–16. <https://doi.org/10.52298/ihsj.v2i1.22>
- Widanan, I. wayan, & Gunawarman, A. A. G. R. (2021). Identifikasi Stakeholder Dan Impikasinya Terhadap Kesuksesan Sebuah Proyek

Studi Kasus: Proyek the Baladewa
Villas-Bali. *Jurnal Arsitektur*
ZONASI, 4(2), 257–266.
<https://doi.org/10.17509/jaz.v4i2.344>
28